

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2020  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 581);

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 88);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 90)

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 91).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II     Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab III    Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
  - 3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
    - 3.1.1. Pendapatan-LRA
    - 3.1.2. Belanja
    - 3.1.3. Pendapatan-LO
    - 3.1.4. Beban
    - 3.1.5. Aset
    - 3.1.6. Kewajiban
    - 3.1.7. Ekuitas
- Bab IV.    Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
- Bab V.     Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	PROSEN TASE
1	2	3	4	5
Pendapatan	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49
Pendapatan Asli Daerah	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49
Hasil Retribusi Daerah	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49
Retribusi Jasa Umum	579.075.000,00	657.680.000,00	78.605.000,00	113,57
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,0	113,49
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>287.791.363.357,00</b>	<b>285.888.130.502,00</b>	<b>(1.903.232.855,00)</b>	<b>99,33</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>277.081.466.891,00</b>	<b>276.855.308.108,00</b>	<b>(226.158.783,00)</b>	<b>99,91</b>
Belanja Pegawai	277.081.466.891,00	276.855.308.108,00	(226.158.783,00)	99,91
Gaji Dan Tunjangan	5.290.926.901,00	5.128.848.118,00	(162.078.783,00)	96,93
Tambahan Penghasilan PNS	271.773.059.740,00	271.708.979.740,00	(64.080.000,00)	99,97
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	17.480.250,00	17.480.250,00	-	100,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.709.896.466,00</b>	<b>9.028.416.934</b>	<b>(1.681.479.532)</b>	<b>84,30</b>
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.198.899.966,00	1.662.370.108,00	(536.529.858,00)	75,60
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.007.186.336,00	957.664.081,00	(49.522.255,00)	95,08
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	372.398.630,00	371.654.096,00	(744.534,00)	99,80
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	819.315.000,00	333.051.931,00	(486.263.069,00)	40,65
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.168.834.000,00	1.166.516.200,00	(2.317.800,00)	99,80
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	520.180.000,00	518.393.000,00	(1.787.000,00)	99,65
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	414.900.000,00	414.522.550,00	(377.450,00)	99,90
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	136.954.000,00	136.929.000,00	(25.000,00)	99,98
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	96.800.000,00	96.671.650,00	(128.350,00)	99,86
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	56.750.000,00	56.693.000,00	(57.000,00)	99,89
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.880.000,00	10.880.000,00	-	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10.900.000,00	10.843.000,00	(57.000,00)	99,47
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	27.010.000,00	27.010.000,00	-	100,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.960.000,00	7.960.000,00	-	100,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	1.411.584.500,00	841.733.700	(569.850.800)	59,63
Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	1.226.720.000,00	657.912.200	(568.807.800)	53,63
Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	184.864.500,00	183.821.500,00	(1.043.000,00)	99,43
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	4.242.222.000,00	3.863.605.486	(378.616.514)	91,08
Pengembangan Profesionalisme Aparatur	3.202.015.000,00	2.934.215.986	(267.799.014)	91,64
Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	1.040.207.000,00	929.389.500,00	(110.817.500,00)	89,34
PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	143.433.000,00	119.260.100,00	(24.172.900,00)	83,14
Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	90.953.000,00	89.515.600,00	(1.437.400,00)	98,41
Penegakan Disiplin Aparatur	52.480.000,00	29.744.500,00	(22.735.500,00)	56,67

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	PROSEN TASE
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	419.336.000,00	388.970.000,00	(30.366.000,00)	92,75
Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	231.586.000,00	201.928.000,00	(29.658.000,00)	87,19
Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	187.750.000,00	187.042.000,00	(708.000,00)	99,62
PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	873.289.000,00	735.582.840	(137.706.160)	84,23
Pengukuran Kompetensi Pegawai	810.553.000,00	673.097.440	(137.455.560)	83,04
Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan	62.736.000,00	62.485.400,00	(250.600,00)	99,60
Pengukuran Kompetensi				
PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	195.548.000,00	193.685.500,00	(1.862.500,00)	99,04
Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah	195.548.000,00	193.685.500,00	(1.862.500,00)	99,04
JUMLAH BELANJA	287.791.363.357,00	285.883.725.042,00	(1.907.638.315,00)	99,33
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	287.208.688.357,00	285.222.445.042,00	1.986.243.315,00	99,31

## 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Terjadinya pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh daerah menjadi kendala umum dalam pencapaian kegiatan sepanjang tahun 2020. Secara spesifik, hambatan dan kendala dalam pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan diantaranya adalah:

### 1. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan ini realisasi tercapai sebesar 40,65%. Sebagai antisipasi penularan covid-19 dan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat dioptimalkan melalui daring/online.

### 2. Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur

Pada kegiatan ini realisasi anggaran tidak bisa tercapai 100 % realisasi tercapai 53,63%. Secara umum, kurang optimalnya capaian target anggaran/kinerja disebabkan oleh adanya ketergantungan Pemda DIY terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan seleksi CPNS.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tanggal 01 Oktober 2019 perihal Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Formasi 2019, jadwal pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi 2019 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	Oktober sd November 2019
2.	Pendaftaran	November 2019
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Desember 2019
4.	Masa sanggah	Desember 2019
5.	Pengumuman hasil sanggah	Desember 2019

6.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020
7.	Pengumuman peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
8.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
9.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020
10.	Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS	April 2020

Terkait adanya pandemi covid-19, berdasar Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 bahwa Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi 2019 ditunda sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut. Selanjutnya berdasar Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 bahwa jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi 2019 dilaksanakan pada 1 September s.d. 12 Oktober 2020. Rangkaian kegiatan seleksi CPNS Formasi 2019 yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2019 baru dapat diselesaikan pada akhir 2020.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/584/M.SM.01.00/2020 tanggal 13 Juli 2020 Perihal Usulan Kebutuhan ASN TA 2021, bahwa Penetapan kebutuhan (formasi) dan pengadaan ASN Tahun 2020 diputuskan ditiadakan.

### 3. Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur

Kegiatan ini realisasi anggaran tidak bisa tercapai 100 %, realisasi tercapai 89,34%. Beberapa masalah dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Tahapan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang sedianya dijadwalkan pada Tahun 2020 ditunda dan dilaksanakan Tahun 2021. Hal tersebut berimplikasi pada belanja sewa komputer dan printer, dan belanja pemeriksaan/tes kesehatan ASN tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Adanya penerapan prosedur kesehatan, kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka dilaksanakan secara daring.

### 4. Penegakan Disiplin Aparatur

Kegiatan Penegakan Disiplin Aparatur terealisasi sebesar 56,67%. Pandemi covid 19 menyebabkan kegiatan FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Kepegawaian belum maksimal dilaksanakan, karena proyeksi kebutuhan untuk dilaksanakan FGD tersebut ada di Triwulan I dan II untuk mengakomodasi kebutuhan FGD beberapa Rapergub di BKD DIY. Namun batal dilaksanakan karena pada saat itu ada pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk meminimalisasi penularan covid-19. Sehingga pembahasan beberapa Rapergub tersebut tidak menggunakan FGD. Pada saat memasuki era new normal, beberapa Rapergub tersebut telah ditetapkan dan selesai. Pelaksanaan FGD dilakukan 1 (satu) kali pada bulan Desember 2020 untuk pembahasan Rapergub TPP.



5. Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun

Kegiatan ini realisasi tercapai sebesar 87,19%. Kendala dalam pencapaian target ini adalah penyerahan SK yang direncanakan tersebar di beberapa titik tidak bisa dilaksanakan karena pandemi dan diserahkan kepada masing-masing OPD. Untuk pembekalan pensiun menggunakan zoom meeting dan hanya mengundang perwakilan pensiun sejumlah 20 orang untuk hadir di BKD.

6. Pengukuran Kompetensi Pegawai

Kegiatan ini mencapai realisasi sebesar Rp83,04%. Realisasi tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang terlaksana. Kegiatan yang telah dijadwalkan namun urung dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Pengukuran Kompetensi dalam rangka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemda DIY dan Tes Psikologi dalam rangka Seleksi Mutasi PNS Masuk Pemda DIY tahun 2020 (telah dijadwalkan kembali pelaksanaannya pada tanggal 4 & 5 Januari 2021).

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD**

**3.1.1. Pendapatan-LRA**

	<b>2020 (Audited)</b>	<b>2019 (Audited)</b>
<b><u>Pendapatan-LRA</u></b>	<b><u>Rp 661.280.000,00</u></b>	<b><u>Rp2.493.800.000,00</u></b>

Pendapatan-LRA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp582.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp661.280.000,00 atau 113,49% dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2020 (Audited)</b>	<b>2019 (Audited)</b>
<b>3.1.1.1 <u>Pendapatan Asli Daerah-LRA</u></b>	<b><u>Rp 661.280.000,00</u></b>	<b><u>Rp2.493.800.000,00</u></b>

Pendapatan Asli Daerah-LRA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp582.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp661.280.000,00 atau 113,49% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Pendapatan Asli Daerah				
a	Retribusi Jasa Umum	579.075.000,00	657.680.000,00	113,57
b	Retribusi Jasa Usaha	3.600.000,00	3.600.000,00	100
	Jumlah	582.675.000,00	661.280.000,00	113,49

	<b>2020 (Audited)</b>	<b>2019 (Audited)</b>
<b>3.1.1.2 <u>Pendapatan Transfer - LRA</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Pendapatan Transfer pada tahun Anggaran 2020 tidak ditargetkan.

	<b>2020 (Audited)</b>	<b>2019 (Audited)</b>
<b>3.1.1.3 <u>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LRA</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun Anggaran 2020 tidak ditargetkan.

**3.1.2. Belanja**

Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar **Rp287.791.363.357,00** dengan realisasi sebesar **Rp285.883.725.042,00** atau **99,34%**. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

	<b>2020 (Audited)</b>	<b>2019 (Audited)</b>
<b>3.1.2.1 <u>Belanja Operasi</u></b>	<b><u>Rp285.372.469.042,00</u></b>	<b><u>Rp198.305.227.683,00</u></b>

Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp287.791.363.357,00 dan realisasi sebesar Rp285.372.469.042,00 atau 99,34%, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2020 (Audited)</b>	<b>2019 (Audited)</b>
<b>3.1.2.1.1    <u>Belanja Pegawai</u></b>	<b><u>Rp277.606.373.108,00</u></b>	<b><u>Rp184.237.696.021,00</u></b>

Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp277.861.781.891,00 dan realisasi sebesar 277.606.373.108,00 atau 99,91%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>5.290.926.901,00</b>	<b>5.128.848.118,00</b>	<b>96,94</b>
	Gaji Pokok PNS	4.240.109.100,00	4098900820	96,67
	Tunjangan Keluarga	374.209.731,00	363.128.436,00	97,04
	Tunjangan Jabatan	221.280.000,00	218.760.000,00	98,86
	Tunjangan Fungsional	108.800.000,00	105.800.000,00	97,24
	Tunjangan Fungsional Umum	140.195.000,00	138.605.000,00	98,87
	Tunjangan Beras	198.894.288,00	196.620.300,00	98,86
	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	7.331.905,00	6.974.450,00	95,12
	Pembulatan Gaji	106.877,00	59.112,00	55,31
<b>2</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>271.773.059.740,00</b>	<b>271.708.979.740,00</b>	<b>99,98</b>
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	271.081.859.740,00	271.081.859.740,00	100
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup	691.200.000,00	627.120.000,00	90,73
<b>3</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>17.480.250,00</b>	<b>17.480.250,00</b>	<b>100</b>
	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	17.480.250,00	17.480.250,00	100
<b>4</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>618.315.000,00</b>	<b>607.065.000,00</b>	<b>98,18</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	556.395.000,00	545.645.000,00	98,07
	Honorarium Pengelola Keuangan	34.920.000,00	34.920.000,00	100,00
	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	Honorarium Pengelola Barang	18.000.000,00	17.500.000,00	97,22
<b>5</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>88,89</b>
	Honorarium Harian Non PNS	162.000.000,00	144.000.000,00	88,89
	<b>Jumlah</b>	<b>277.861.781.891,00</b>	<b>277.606.373.108,00</b>	<b>99,91</b>

	<b>2020 (Audited)</b>	<b>2019 (Audited)</b>
<b>3.1.2.1.2    <u>Belanja Barang dan Jasa</u></b>	<b><u>Rp7.766.095.934,00</u></b>	<b><u>Rp.14.067.531.662,00</u></b>

Belanja Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp9.417.601.466,00 dan realisasi sebesar Rp7.766.095.934,00 atau 82,46%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	328.239.550,00	320.950.931,00	97,78
2	Belanja Bahan/Material	126.713.300,00	102.018.900,00	80,51
3	Belanja Jasa Kantor	1.376.885.866,00	1.210.520.896,00	87,92
4	Belanja Iuran BPJS	-	-	-
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105.250.000,00	104.569.450,00	99,35
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	347.490.250,00	339.617.800,00	97,73
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00	15.000.000,00	35,71
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.000.000,00	19.800.000,00	63,87
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	841.595.000,00	407.484.700,00	48,42
10	Belanja Makanan dan Minuman	907.225.000,00	717.471.540,00	79,08
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-
12	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	100
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	49.662.500,00	99,33
14	Belanja Perjalanan Dinas	979.292.000,00	321.791.667,00	32,86
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.066.580.000,00	1.984.630.000,00	96,03
16	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	847.011.500,00	846.748.000,00	99,97
17	Belanja Pemeliharaan	653.104.000,00	652.382.050,00	99,89
18	Belanja Jasa Konsultansi	206.690.000,00	204.847.500,00	99,11
19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	506.525.000,00	466.600.000,00	92,12
Jumlah		9.417.601.466,00	7.766.095.934,00	82,46

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.2.2    <u>Belanja Modal</u></b>	<b>Rp511.256.000,00</b>	<b>Rp1.106.362.500,00</b>

Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp511.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp511.256.000,00 atau 99,86%, dengan rincian sebagai berikut:

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.2.2.1    <u>Belanja Modal Tanah</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Belanja Modal Tanah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.2.2.2    <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u></b>	<b>Rp145.568.000,00</b>	<b>Rp1.063.050.500,00</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp146.292.000,00 dan realisasi sebesar Rp 145.568.000,00 atau 99,51%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	70.260.000,00	70.060.000,00	99,72
2	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.772.000,00	35.772.000,00	100
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	36.260.000,00	36.260.000,00	100
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	4.000.000,00	3.476.000,00	86,90
	Jumlah	146.292.000,00	145.568.000,00	99,51

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Alat Rumah Tangga sebesar Rp70.060.000,00, Komputer sebesar Rp35.772.000, Alat Studio sebesar Rp34.510.000,00, Alat Kedokteran sebesar Rp3.476.000,00 dan terdapat penambahan aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp1.750.000,00.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.2.2.3</b> <u><b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b></u>	<u><b>Rp0,00</b></u>	<u><b>Rp0,00</b></u>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.2.2.4</b> <u><b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b></u>	<u><b>Rp365.688.000,00</b></u>	<u><b>Rp0,00</b></u>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp365.688.000,00 dan realisasi sebesar Rp 365.688.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	365.688.000,00	365.688.000,00	100
	Jumlah	365.688.000,00	365.688.000,00	100

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon tersebut telah dicatat dalam Aset Tetap yaitu Elektrik Generating Set sebesar Rp359.353.100,00 dan telah dilakukan reklas karena adanya addendum berupa kabel ke persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp6.334.900,00.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.2.2.5</b> <u><b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b></u>	<u><b>Rp0,00</b></u>	<u><b>Rp0,00</b></u>

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.2.2.6</b> <u><b>Belanja Modal Aset Lainnya</b></u>	<u><b>Rp0,00</b></u>	<u><b>Rp0,00</b></u>

Belanja Modal Aset Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.2.2.7</b> <u>Belanja Dana Keistimewaan</u>	<u><b>Rp0,00</b></u>	<u><b>Rp0,00</b></u>

Belanja Modal Aset Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.2.3</b> <u>Belanja Tak Terduga</u>	<u><b>Rp 0,00</b></u>	<u><b>Rp1.106.362.500,00</b></u>

Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan.

### 3.1.3. Pendapatan-LO

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<u><b>Pendapatan-LO</b></u>	<u><b>Rp661.280.000,00</b></u>	<u><b>Rp2.493.800.000,00</b></u>

Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar **Rp661.280.000,00** yang merupakan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.3.1</b> <u>Pendapatan Retribusi Daerah-LO</u>	<u><b>Rp 661.280.000,00</b></u>	<u><b>Rp2.488.750.000,00</b></u>

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp661.280.000,00 terdiri dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO sebesar Rp657.680.000,00 dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO berupa pendapatan sewa ruangan untuk kantin dan sewa ruang usaha koperasi dan fotokopi sebesar Rp3.600.000,00. Seluruh pendapatan telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.3.2</b> <u>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO</u>	<u><b>Rp0,00</b></u>	<u><b>Rp5.050.000,00</b></u>

Pada tahun 2020 tidak ada Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO. Pendapatan sewa ruangan untuk kantin dan sewa ruang usaha koperasi dan fotokopi Tahun 2020 masuk rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### 3.1.4. Beban

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<u><b>Beban</b></u>	<u><b>Rp286.903.734.402,07</b></u>	<u><b>Rp199.933.705.473,72</b></u>

Realisasi Beban Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp286.903.734.402,07 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.4.1    <u>Beban Operasi</u></b>	<b><u>Rp 286.903.734.402,07</u></b>	<b><u>Rp199.933.705.473,72</u></b>

Realisasi Beban Operasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp286.903.734.402,07 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp277.606.294.436,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 7.770.868.383,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 1.526.571.583,07 dengan rincian sebagai berikut:

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.4.1.1    <u>Beban Pegawai</u></b>	<b><u>Rp277.606.294.436,00</u></b>	<b><u>Rp184.231.004.529,00</u></b>

Realisasi Beban Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp277.606.294.436,00dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	<b>Beban Gaji dan Tunjangan - LO</b>	5.128.769.446,00
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	4.098.905.620,00
	Tunjangan Keluarga – LO	363.044.940,00
	Tunjangan Jabatan – LO	218.760.000,00
	Tunjangan Fungsional – LO	105.800.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum - LO	138.605.000,00
	Tunjangan Beras – LO	196.620.300,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	6.974.450,00
	Pembulatan Gaji – LO	59.136,00
2	<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO</b>	271.708.979.740,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	271.081.859.740,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup - LO	627.120.000,00
3	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	17.480.250,00
	Insentif Retribusi Jasa Umum - LO	17.480.250,00
4	<b>Honorarium PNS</b>	607.065.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	545.645.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00
	Honorarium Pengelola Keuangan	34.920.000,00
	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	0,00
	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
	<b>Honorarium Pengelola Barang</b>	17.500.000,00
6	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>144.000.000,00</b>
	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	0,00
	Honorarium Harian Non PNS	144.000.000,00
Jumlah		Rp277.606.294.436,

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai sejumlah Rp277.606.373.108,00 dengan Beban Pegawai sejumlah Rp277.606.294.436,00. Perbedaan nilai yang terjadi antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai adalah sebesar Rp78.627,00. Hal ini dikarenakan terdapat pelunasan utang gaji pegawai bulan Desember 2019 sebesar Rp679.872,00 sehingga beban berkurang sejumlah tersebut. Selain itu, terdapat utang gaji pegawai bulan Desember 2020 sebesar Rp601.200,00 sehingga menambah beban pegawai.

Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 679.872,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	Rp 596.400,00
Tunjangan Keluarga – LO	Rp 83.496,00
Tunjangan Fungsional – LO	Rp 0,00
Tunjangan Fungsional Umum – LO	Rp 0,00
Tunjangan Beras – LO	Rp 0,00
Pembulatan Gaji – LO	Rp (24,00)
Beban Pegawai	Rp 601.200,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 601.200,00

Oleh karena itu terdapat selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp78.672,00.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.4.1.2    <u>Beban Barang dan Jasa</u></b>	<b><u>Rp7.770.868.383,00</u></b>	<b><u>Rp14.096.281.500,00</u></b>

Realisasi Beban Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.770.868.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	0,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00
3	Beban Jasa Kantor	1.205.128.085,00
4	Beban Premi Asuransi	0,00
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	20.013.800,00
6	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	19.800.000,00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	407.484.700,00
10	Beban Makanan dan Minuman	717.471.540,00
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00
12	Beban Perjalanan Dinas	321.791.667,00
13	Beban Pemeliharaan	652.382.050,00
14	Beban Jasa Konsultasi	204.847.500,00
15	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.984.630.000,00
16	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	846.748.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	466.600.000,00
18	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00
19	Beban Persediaan Barang Pakai Habis	908.971.041,00
	Jumlah	Rp7.770.868.383,00

Terdapat selisih antara belanja barang dan jasa dengan beban barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah senilai Rp7.766.095.934,00 sedangkan jumlah beban barang dan jasa adalah senilai Rp7.770.868.383,00. Selisih tersebut adalah sejumlah Rp(4.772.449,00). Hal ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Beban Bertambah dikarenakan:

Selisih saldo awal persediaan dan saldo akhir persediaan	Rp (7.580.360,00)
Pembayaran hutang listrik, telepon dan air bulan Desember 2019	Rp 29.688.155,00



Reklas hard disk dari persediaan menjadi aset tetap	Rp 2.000.000,00
Reklas headset dan mic dari persediaan menjadi aset tetap	Rp <u>1.750.000,00</u>
	Rp 25.857.795,00
Beban Berkurang dikarenakan:	
Pengakuan hutang listrik dan telepon bulan Desember 2020	Rp 24.295.344,00
Reklas Kabel	Rp <u>6.334.900,00</u>
	Rp 30.630.244,00
Jumlah	Rp (4.772.449,00)

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.4.1.3    <u>Beban Penyusutan dan Amortisasi</u></b>	<b><u>Rp 1.526.571.583,07</u></b>	<b><u>Rp 1.606.419.444,72</u></b>

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.526.571.583,07 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.251.580.016,87
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	246.699.439,02
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.292.127,18
	Jumlah	Rp1.526.571.583,07

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.4.1.4    <u>Beban Penyisihan Piutang</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Realisasi Beban Penyisihan Piutang

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.4.1.5    <u>Beban Lain-lain</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Realisasi Beban Realisasi Beban Lain-lain.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.    Aset</b>	<b><u>Rp12.571.337.201,15</u></b>	<b><u>Rp 13.160.355.685,22</u></b>

Aset Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2020 sebesar **Rp12.571.337.201,15** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp73.726.310,00**, Aset Tetap sebesar **Rp1.722.032.791,15** dan Aset Lainnya sebesar **Rp775.578.100,00** dengan rincian sebagai berikut:

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.1    <u>Aset Lancar</u></b>	<b><u>Rp73.726.310,00</u></b>	<b><u>Rp81.306.670,00</u></b>

Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp73.726.310,00** dengan rincian sebagai berikut:

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.1.1    <u>Kas dan Setara Kas</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,-

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.1.2    <u>Piutang Pendapatan</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.1.3    <u>Piutang Lainnya</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,-

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.1.4    <u>Penyisihan Piutang</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,-

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.1.5    <u>Persediaan</u></b>	<b><u>Rp73.726.310,00</u></b>	<b><u>Rp81.306.670,00</u></b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp73.726.310,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	<u>Uraian</u>	2020
<b>1.</b>	<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>73.726.310,00</b>
a.	Bahan	15.600.000,00
b.	Suku Cadang	0
c.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	58.126.310,00
<b>2.</b>	<b>Barang Tak Pakai Habis</b>	<b>0</b>
a.	Komponen	0
<b>b.</b>	<b>Pipa</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Barang Bekas Dipakai</b>	<b>0</b>
a.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0
	<b>Jumlah</b>	<b>73.726.310,00</b>

Terdapat perbedaan persediaan barang pakai habis berupa persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor sebesar Rp4.334.900,00. Hal ini disebabkan reklas eksternal hard disk sebesar Rp2.000.000,00 dari beban persediaan alat tulis kantor menjadi aset tetap dan Reklas Kabel karena adendum dari Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp6.334.900,00.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.2    <u>Aset Tetap</u></b>	<b><u>Rp11.722.032.791,15</u></b>	<b><u>Rp12.298.723.515,22</u></b>

Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp11.722.032.791,15** dengan rincian sebagai berikut:

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.2.1    <u>Tanah</u></b>	<b><u>Rp400.000.000,00</u></b>	<b><u>Rp400.000.000,00</u></b>

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar **Rp400.000.000,00** berasal dari saldo awal sebesar **Rp400.000.000,00** pada tahun 2020 tidak ada pengadaan tanah.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.2.2    <u>Peralatan dan Mesin</u></b>	<b><u>Rp13.674.434.109,00</u></b>	<b><u>Rp13.249.555.830,00</u></b>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar **Rp13.674.434.109,00** dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2020, yakni:

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp70.060.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp35.772.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	Rp36.260.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	Rp 3.476.000,00

Selain itu, terdapat beberapa kapitalisasi sebagai berikut:

Eksternal hard disk dari beban persediaan	Rp 2.000.000,00
Headset dan mic dari beban persediaan	Rp 1.750.000,00

Selama Tahun 2020 terdapat tambahan Peralatan dan Mesin pelimpahan dari Organisasi Perangkat Daerah lain, yaitu:

UPS, Kamera Video, PC Unit dan Scanner	Rp 20.137.425,00
Kendaraan Penumpang dari Paniradya Kaistimewan	Rp376.553.334,00

Jumlah Mutasi Tambah	Rp546.008.759,00
----------------------	------------------

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp531.490.080,00 berupa:

Penghapusan	Rp525.155.180,00
Adendum kabel	Rp 6.334.900,00

c. Penerimaan hibah

Pada tahun 2020 terdapat Penerimaan Hibah dari BPD DIY berupa Fasad yang telah dicatat dalam Aset Tetap Alat Kantor senilai Rp50.000.000,00.

- d. Ekstrakomtabel
- Hasil pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2020, berupa meubelair sebesar Rp19.530.000,00 dan reklas headset dan mic dari persediaan sebesar Rp1.750.000,00. Jadi, total ekstrakom sebesar Rp 21.280.000,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp13.674.434.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
<b>1</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
	Alat-Alat Besar Darat	0
	Alat-Alat Besar Apung	0
	Alat-alat Bantu	793.052.100,00
	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.825.056.984,00
	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1.900.000,00
	Alat Angkut Apung Bermotor	0
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0
	Alat Angkut Bermotor Udara	0
	Alat Bengkel Bermesin	6.050.000,00
	Alat Bengkel Tak Bermesin	0
	Alat Ukur	0
	Alat Pengolahan	4.040.000,00
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0
	Alat Kantor	3.355.460.591,00
	Alat Rumah Tangga	4.162.685.985,00
	Komputer	2.060.168.300,00
	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	57.606.500,00
	Alat Studio	1.293.405.649,00
	Alat Komunikasi	93.742.000,00
	Alat Pemancar	0
	Alat Kedokteran	5.476.000,00
	Alat Kesehatan	0
	Unit-Unit Laboratorium	0
	Alat Pelindung	0
	Alat SAR	0
	Alat Kerja Penerbangan	0
	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0
	Unit Peralatan Proses/Produksi	0
	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	15.790.000,00
	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	0
	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	0
	Peralatan Olahraga	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp13.674.434.109,00</b>

		2020 (Audited)	2019 (Audited)
3.1.5.2.3	<b><u>Gedung dan Bangunan</u></b>	<b><u>Rp12.656.225.063,00</u></b>	<b><u>Rp12.656.225.063,00</u></b>

Pada tahun anggaran 2020 tidak terdapat mutasi bertambah maupun mutasi berkurang.

		2020 (Audited)	2019 (Audited)
3.1.5.2.4	<b><u>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</u></b>	<b><u>Rp 772.038.404,00</u></b>	<b><u>Rp 772.038.404,00</u></b>

Pada tahun anggaran 2020 tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

		2020 (Audited)	2019 (Audited)
3.1.5.2.5	<b><u>Aset Tetap Lainnya</u></b>	<b><u>Rp126.786.300,00</u></b>	<b><u>Rp126.786.300,00</u></b>

Pada tahun anggaran 2020 tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada aset tetap lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp126.786.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>126.786.300,00</b>
	Buku	100.546.300,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	26.240.000,00
	Alat Olah Raga Lainnya	0
	<b>Jumlah</b>	<b>126.786.300,00</b>

		2020 (Audited)	2019 (Audited)
3.1.5.2.6	<b><u>Konstruksi Dalam Pengerjaan</u></b>	<b><u>Rp500.008.700,00</u></b>	<b><u>Rp500.008.700,00</u></b>

Pada tahun 2020 tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang pada Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tak Berwujud.

		2020 (Audited)	2019 (Audited)
3.1.5.2.7	<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>	<b><u>Rp(16.407.459.784,85)</u></b>	<b><u>Rp(15.405.881.781,78)</u></b>

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp(16.407.459.784,85)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.945.764.063,97)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.259.777.715,30)
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(180.168.005,58)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(21.750.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp(16.407.459.784,85)</b>

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.3    <u>Aset Lainnya</u></b>	<b><u>Rp775.578.100,00</u></b>	<b><u>Rp780.316.500,00</u></b>

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp775.578.100,00** dengan rincian sebagai berikut:

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.3.1    <u>Tagihan Jangka Panjang</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.3.2    <u>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.5.3.3    <u>Aset Tidak Berwujud</u></b>	<b><u>Rp775.416.500,00</u></b>	<b><u>Rp775.416.500,00</u></b>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar **Rp775.416.500,00**, tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

### 3.1.6. Kewajiban

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.6    <u>Kewajiban</u></b>	<b><u>Rp28.192.321,00</u></b>	<b><u>Rp30.368.027,00</u></b>

Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.192.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.6.1    <u>Kewajiban Jangka Pendek</u></b>	<b><u>Rp24.896.544,00</u></b>	<b><u>Rp30.368.027,00</u></b>

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.896.544,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.6.1.1    <u>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 Rp0

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
<b>3.1.6.1.2    <u>Pendapatan Diterima Dimuka</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>	<b><u>Rp0</u></b>

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 Rp0.

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
3.1.6.1.3 <u>Utang Belanja</u>	<u>Rp24.896.544,00</u>	<u>Rp30.368.027,00</u>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2020 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	601.200,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	24.295.344,00
	Jumlah	24.896.544,00

	2020 (Audited)	2019 (Audited)
3.1.6.1.4 <u>Utang Jangka Pendek Lainnya</u>	<u>Rp0</u>	<u>Rp0</u>

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 Rp0.

3.1.7. Ekuitas

	2020	2019 (Audited)
3.1.7 <u>Ekuitas</u>	<u>Rp12.550.846.117,15</u>	<u>Rp13.129.987.658,22</u>

Saldo Ekuitas sebesar Rp12.550.846.117,15 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2020. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	EKUITAS AWAL	13.129.987.658,22
	Surplus/Defisit - LO	(286.242.454.402,07)
	RK PPKD	285.226.850.502,00
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	436.462.359,00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	Rp12.550.846.117,15

Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar berasal dari:

Mutasi Tambah Aset	
- Penghapusan Aset lain-lain	462.280.007,00
- Ekstrakomtabel	1.750.000,00
- Ekstrakomtabel Meubelair	19.530.000,00
Jumlah	483.560.007,00

Mutasi Kurang Aset	
- Penyesuaian Saldo Awal Rambu-rambu	15.790.000,00
- Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	457.380.007,00
- Hibah Fasad dari BPD DIY	50.000.000,00
- Mutasi tambah mobil dari Paniradya Kaistimewan	376.553.334,00
- Mutasi tambah UPS, Camera Video, PC Unit dan Scanner	20.137.425,00
- Koreksi Kesalahan Pencatatan	161.600,00
	<hr/>
	920.022.366,00

**Jadi, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar adalah sebesar Rp436.462.359,00.**



## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD**

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah jo Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.

Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
5. Pengukuran dan sertifikasi kompetensi pegawai;
6. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten / Kota;
7. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;
9. Fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia/Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
11. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

**Visi** Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

***"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".***

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis, melalui **Misi** Badan Kepegawaian Daerah DIY yaitu **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Kepala



AMIN PURWANI S.H., M.Ec.Dev.  
NIP. 196807131998032003

